

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2. 1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Iskandar Putong (2013:411) Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan regional bruto) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Sedangkan, menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh laju pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan pembangunan ekonomi di daerah akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Jannah et al., 2022:348). Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula ditingkatkan.

Pada teori klasik, ada beberapa pertumbuhan ekonomi yang banyak dikemukakan oleh beberapa ekonom, diantaranya adalah Mazhab Klasik.

Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry The Nature and Gauses of th Wealth of Nation* dan *The Wealth of Nation*. Menurut Mazhab Klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor :

- 1) Jumlah Penduduk
- 2) Jumlah stok barang – barang modal
- 3) Luas tanah dan kekayaan alam
- 4) Penggunaan teknologi

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Konsep ini melibatkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ini diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dipandang sebagai indikator kunci keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah.

2.1.1.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:332) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah merupakan hal

yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah jika tidak memiliki sumber daya alam cenderung lambat dalam pembangunan.

2. Organisasi

Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan berperan sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wirasastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpter, seorang wiraswastawan tidak perlu orang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

3. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, *output* nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan membawa kearah penggalian sumber daya

alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja modal dan sektor produksi.

2.1.1.3 Faktor – Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Rahardja & Manurung, 2019:297), para ekonom aliran klasik telah mempelajari gejala pertumbuhan ekonomi. Maka, sangat baik untuk melihat pandangan mereka tentang faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dijelaskan sebagai berikut :

1. Barang Modal

Agar ekonomi bertumbuhan, stok barang modal harus ditambah. Penambahan stok barang modal dilakukan melalui investasi. Karena itu, salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi adalah menangani faktor – faktor yang memengaruhi tingkat investasi. Ingat bahwa pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi netto lebih besar dari nol. Sebab, jika investasi netto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas.

2. Tenaga kerja

Sampai saat ini, khususnya di negara sedang berkembang (NSB), tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan *output*. Masalah utamanya adalah sampai berapa banyak penambahan TK akan terus meningkatkan *output*. Hal itu sangat tergantung dari seberapa cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return* (TLDR), sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinergi antara TK dan teknologi, penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, jumlah TK yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan makin tinggi. Timbullah imbang korban (*trade off*) antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan *output* secara efisien, pilihan yang rasional adalah teknologi padat modal. Harga dari pilihan tersebut adalah menciutnya kesempatan kerja.

3. Teknologi

Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan output. Hal ini karena tujuan akhir pertumbuhan ekonomi adalah masyarakat yang adil dan sejahtera, bukan orang per orang. Kemajuan teknologi telah makin memperbesar ketimpangan ekonomi antarbangsa, terutama antara negara – negara maju dan negara sedang berkembang.

4. Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar *output* yang dihasilkan. Namun dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan *output* yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Uang akan sangat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, selama penggunaannya sangat efisien. Tingkat efisiensi penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan.

5. Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi yang tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi, namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

6. Kewirausahaan

Lebih luas daripada cakupan manajemen adalah kewiraswastaan. Kewiraswastaan didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko guna memperoleh keuntungan. Keberanian itu bukan asal – asalan. Para pengusaha mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, atau menjadi barang dan jasa, yang akan

dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengkombinasikan input ini dapat disebut sebagai kemampuan inovasi.

7. Informasi

Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Tuntutan gerakan reformasi di Indonesia berupa transparansi dan kebebasan informasi, dilihat dari teori ekonomi, dapat dibenarkan. Sebab, semakin banyak, semakin benar, dan makin berimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan lebih baik. Alokasi sumber daya ekonomi makin efisien.

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Rahardja & Manurung (2019:302) ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi untuk melihat antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor – faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Berikut teori – teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli :

1. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Solow)

Teori ini merupakan penyempurnaan teori – teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan teori pertumbuhan Neo Klasik adalah akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi – asumsi penting dari model Solow antara lain adalah :

- a Tingkat teknologi dianggap konstan;
- b Tingkat depresiasi dianggap konstan;

- c Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal;
- d Tidak ada sektor pemerintah;
- e Tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) juga dianggap konstan;
- f Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

2. Teori Pertumbuhan Endogenus (Teori Romer)

Teori ini merupakan pengembangan mutakhir teori pertumbuhan Neo Klasik. Kelamahan model ini maupun neo klasik terletak pada asumsi bahwa teknologi bersifat eksogenus. Konsekuensi asumsi ini adalah terjadinya *the law of diminishing return*, karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (*fixed input*). Konsekuensi lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai faktor eksogen dan konstan adalah perekonomian yang telah lebih dahulu maju, dalam jangka panjang akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang selama tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan, dan akses terhadap teknologi adalah sama.

3. Teori Schumpeter

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewiraswastaan. Sebab, para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasi penemuan – penemuan baru, dalam aktivitas produksi. Langkah–langkah pengaplikasian

penemuan – penemuan baru dalam dunia usaha merupakan langkah – langkah inovasi. Termasuk dalam langkah – langkah inovasi adalah penyusunan teknik tahap produksi serta masalah organisasi manajemen, agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar.

Menurut Schumpeter, kemajuan perekonomian kapitalis disebabkan diberinya keleluasaan untuk para entrepreneur. Sayangnya, keleluasaan tersebut cenderung memunculkan monopoli kekuatan pasar. Monopoli inilah yang memunculkan masalah – masalah non ekonomi.

4. Teori Harrod – Domar

Teori Harrod Domar dikembangkan secara terpisah (sendiri – sendiri) dalam periode yang bersamaan oleh E.S Domar (1947, 1948) dan R.F Harrod (1939, 1948). Keduanya melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi.

2.1.1.5 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Mengingat sulitnya mengumpulkan data PDB, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat, biasanya dilakukan secara triwulanan atau tahunan.

Menurut Kuncoro (2014:137) perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menghitung PDRB Riil dari PDRB Nominal

$$\text{PDRB Riil} = \frac{\text{PDRB Nominal}}{\text{Indeks Harga}} \times 100\%$$

2. Tingkat Pertumbuhan PDRB Per Kapita

$$\text{Pertumbuhan PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB Perkapita Tahun ini} - \text{PDRB Perkapita Tahun Lalu}}{\text{PDRB Per Kapita Tahun lalu}} \times 100\%$$

3. Rumus Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Riil)

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_n - \text{PDRB}_{n-1}}{\text{PDRB}_{n-1}} \times 100\%$$

Menurut Kuncoro (2014:138) Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan PDRB Riil (harga konstan) dan atau nominal (harga berlaku). Namun pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB Riil akan memberikan gambaran pertumbuhan secara nyata karena PDRB Riil telah memasukkan faktor inflasi. Maka, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$PE = \frac{\text{PDRB}_n - \text{PDRB}_{n-1}}{\text{PDRB}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_n = PDRB tahun yang dihitung

PDRB_{n-1} = PDRB tahun sebelumnya

2.1.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari wilayahnya sendiri. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Namun kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan penggalan dan peningkatan pad yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah (Putra, 2018:150-151).

Menurut Prastiwi & Aji (2020:91) Pendapatan asli daerah ialah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dapat dijadikan sumber pendapatan yang penting bagi suatu daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan

daerahnya untuk melaksanakan program dan aktivitas pembangunan daerah semakin besar pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari wilayahnya itu sendiri. Konsep ini menekankan otonomi fiskal daerah, dimana pemerintah setempat memiliki wewenang untuk menetapkan dan memungut pendapatan sesuai dengan peraturan daerah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, PAD ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, PAD memegang peran strategis dalam mewujudkan desentralisasi fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

2.1.2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Putra (2018:152) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pad yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berikut penjelasannya :

1. Pajak Daerah

Menurut Putra (2018:155) pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah – daerah di samping retribusi daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembangunan daerah. Pajak Kota/Kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Berdasarkan pendapat di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa retribusi ini terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Oleh karena itu, semakin

banyak pelayanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada pemerintah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil ini merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah diklasifikasikan menjadi tiga bagian, meliputi; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada pemilik perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain – lain PAD yang Sah

Lain – lain PAD yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.2.3 Pengukuran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain PAD yang sah. Maka, untuk menghitung pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus perhitungan berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain lain pad yang sah}$$

Sementara itu, untuk mengukur indikator pertumbuhan yang menunjukkan persentase peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun dapat menggunakan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian fiskal.

Menurut Putra (2018:150), Berikut cara untuk mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$$LPPAD = \frac{(\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1})}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

LPPAD = Laju Pertumbuhan Pendapatan asli daerah

PAD_n = PAD tahun berjalan

PAD_{n-1} = PAD tahun sebelumnya

2.1.3 Tingkat Kemandirian Keuangan daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah berarti pemerintah daerah mampu melakukan pertanggungjawaban dan pembiayaan keuangan sendiri, melakukan sendiri berdasarkan prinsip desentralisasi.

Menurut Akhmad et al., (2020:34) Kemandirian keuangan daerah merupakan potensi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berkontribusi melalui pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa keuangan daerah sebagai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip desentralisasi, dengan memanfaatkan sumber pendapatan dari pajak dan retribusi. Selain itu,

keuangan daerah mencakup hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

2.1.3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Tangkilisan (2007:126) mengemukakan terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, yakni :

1. Potensi Ekonomi Daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan Lembaga Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2.1.3.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian keberhasilan selama periode waktu tertentu, tanpa bantuan dari pemerintah pusat, digunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode secara mandiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat, semakin besar rasio kemandirian daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan baik (Tanudy & Parera, 2023:190).

Menurut Tanudy & Parera (2023:188) ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah :

- a. Rasio Kemandirian adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode secara mandiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

- b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- c. Rasio Desentralisasi Fiskal mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan dan mengelola kinerja fiskal yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Penelitian ini, sebagai pengukuran kemandirian keuangan daerah digunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Dana APBD yang digunakan adalah total seluruh pendapatan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Banten yang terdiri dari total pendapatan yang berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan Rasio PAD menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang juga semakin meningkat (Kuncoro, 2014:9).

2.1.3.4 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Interval	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL UGM (1991)

Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mengukur kemampuan keuangan daerah. Nilai interval yang minimal lebih besar dari 50% menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang baik. Semakin besar rasio yang dihasilkan, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk

membiayai kegiatannya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio yang dihasilkan, semakin kecil kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kegiatan daerahnya sendiri (Kementrian Keuangan, 2016:9).

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain :

1. Tolosang (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan memberi kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara bersama – sama Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan.
2. Karouw et al., (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Manado dan memberikan Kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Puspita Laoli et al., (2020) dalam penelitiannya dengan judul *The Effect of Economic Growth and Local Own Income on the Level of Regional Financial Independence (A case study in a regency/City in North Sumatra)* dan menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan.

4. Novitasari & Novitasari (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang memberikan Kesimpulan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Fadhillah & Widiastuty (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
6. Siringo (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memberikan Kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negative signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.

7. Kristina et al. (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan memberikan Kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah.
8. Hermawan (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah yang memberikan kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
9. Novianti & Ishak (2022) telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah.
10. Primafira & Eka (2018) telah melakukan penelitian dengan judul *Total Realization of Regional Income and the Implications on Regional Financial Performance in West Java Province*, dan memberikan Kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah.
11. Warman & Arza (2024) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan memberikan

Kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

12. Andriani & Wahid (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
13. Machfud et al., (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dan memberikan Kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah.
14. Kumila (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020, dan memberikan Kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
15. Gaghana et al. (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (studi Kasus Pada Kota Manado, dll) yang memberikan Kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan

daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

16. Riswati & Fahriza (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan memberikan Kesimpulan bahwa Kabupaten Bandung Barat belum mandiri, hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan pendapatan asli daerah yang masih rendah.
17. Bella et al. (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Effect of Local Revenue, General Allocation Fund and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence, dan memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah.
18. Nurainy et al. (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang memberikan Kesimpulan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan juga menunjukkan hasil yang sama.
19. Ashary et al. (2023) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui UMKM dan mengemukakan Kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap

UMKM dan kemandirian Keuangan Daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap UMKM dan kemandirian keuangan daerah.

20. Malau et al. (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan memberikan Kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adapun untuk melihat orisinalitas penelitian, disajikan pada tabel 2.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Krest D Tolosang, 2018, Kota Tomohan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Petumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan PAD Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat penelitian : Kota Tomohon Metode analisis deskriptif kuantitatif	Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan, pad memiliki pengaruh signifikan, secara simultan memiliki pengaruh signifikan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 03 Tahun 2018

2	Tessa Lonica Karouw, Daisy S.M. Engka, Krest D. Tolosang , 2022 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Manado	Variabel pertumbuhan ekonomi Variabel kemandirian keuangan daerah Metode analisis : analisis regresi berganda	Variabel penerimaan retribusi daerah, penerimaan pajak daerah Tempat penelitian : Kota Manado Jenis penelitian : deskriptif kualitatif	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No. 4 bulan Mei 2022
3	Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmoran g, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan , 2020, Kota/Kabupaten di Sumatera Utara The Effect of Economic Growth and Local Own Income on the Level of Regional	Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah Variabel dependen : Tingkat kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : di Kota/Kabupaten di Sumatera Utara	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi , dan Akuntansi) Volume 4 Np. 3 2020 ISSN : 2621-5306

	Financial Independence (A case study in a regency/City in North Sumatra)				
4	Maya Novitasari, Lita Novitasari, 2019, Jawa Timur Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel pertumbuhan ekonomi Variabel kemandirian keuangan daerah	Variabel pajak, retribusi, DBH, Belanja Modal Tempat penelitian : Jawa Timur	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Akuntansi Vol.3 No. 2 Oktober 2019
5	Rifda Fadhilah & Tri Widiastuty, 2023 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Jawa Barat	pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Journal Review of Accounting & Business Vol. 4 No. 1 Juni 2023 E-ISSN : 2774-5287
6	Rapma Wati Siringo, 2022	Variabel pertumbuhan ekonomi,	Variabel dana alokasi umum, dana bagi hasil	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh	Ekopem (Jurnal Ekonomi

	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara	pendapatan asli daerah Variabel kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Sumatra Utara	uh negative signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan .	Pembangunan) Volume 4 Nomor 4 Desember 2022 E- ISSN : 2503-3093
7	Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko dan Hansly F. DJSiwu, 2021, Kabupaten Halmahera Tengah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel pendapatan asli daerah Variabel Kemandirian keuangan daerah	Variabel dana perimbangan	Pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah	Jurnal EMBA Vol. 10 No. 1 Januari 2021 ISSN : 2303-1174
8	Rifaldy Ricky Hermawan , Solehudin,	Variabel pertumbuhan ekonomi	Variabel belanja modal	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh	Innovative : Journal of Social

	2023, Provinsi Jawa Barat Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah	Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Jawa Barat	terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah	Science Research Volume 3 nomor 3 Tahun 2023 E-ISSN : 2807-4238
9	Novianti D & Ishak J Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung	Variabel Pendapatan asli daerah Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Jawa Barat	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah	Indonesiaan Accounting Research Journal Vol. 2 no.3 June 2022 ISSN : 2747-1241
10	Andi Primafira & Bumandava Eka, 2019 <i>Total Realization of Regional Income and The Implications on Regional Financial Performance in West Java Province</i>	Variable : Local generate revenue (PAD) Variable : financial performance of the regency	Tempat penelitian : West Java Province	The local generated revenue (PAD) simultaneously has a significant effect on the financial performance of the regency and city governments in South Sumatera Province	Jurnal Akuntansi

11	Aditia Warman, Fefri Indra Aziz, 2024, Provinsi Sumatra Barat Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel pertumbuhan ekonomi Variabel kemandirian keuangan daerah	Variabel ukuran pemerintah, belanja modal Tempat penelitian : Provinsi Sumatra Barat	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Nuansa Karya Akuntansi Vol. 2 No. 2 Agustus 2024 E-ISSN : 2988-2702
12	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid, 2018, Kota Tasikmalaya Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel pendapatan asli daerah Variabel Kemandirian keuangan daerah	Variabel dana perimbangan Tempat penelitian : Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 ISSN : 1907-9958
13	Machfud et al, 2020 Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat	Variabel Pendapatan asli daerah Variabel kemandirian keuangan daerah	Variabel Dana perimbangan, dana otonomi khusus dan Tingkat kemiskinan	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat kemandiri	Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind) Vol. 5 No. 1 Januari –

	Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		Tempat penelitian : Provinsi Aceh	an keuangan daerah	Juni 2020 ISSN : 2403-4367
14	Zesmi Kusmila, 2023 Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020	Variabel pendapatan asli daerah Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel belanja modal Tempat penelitian : Kabupaten Kerinci	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Pendidikan Tanbusai Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN 2614-3097
15	Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen < Debby Ch. Rotinsulu, 2018, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Mobagu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian	Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Mobagu	Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 19 no. 7 Tahun 2018 ISSN : 1907-6441

	n Keuangan Daerah				
16	Riswati & Fahriza, 2023 Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat	Variabel pendapatan asli daerah Variabel kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat belum mandiri disebabkan karena jumlah perolehan pad yang masih rendah	JEKP (Jurnal Ekonomi dan keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 Desember 2023 E-ISSN : 2685-6069
17	Shinta Bella, Fitrah Sari, Ulyya Rahmi Aswin, 2022, Sumatera Barat judul Effect of Local Revenue, General Allocation Fund and Capital Expenditure on the Level of Regional Financial Independence	Variabel pendapatan asli daerah Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah	Variabel dana alokasi umum, belanja modal Tempat penelitian : Provinsi Sumatra Barat	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Syntax Transformation Vol. 3 No. 5 mei 2022 E-ISSN : 2721-2769
18	Renny Nur'ainy, Desitriana, dan Roowshan Budi Utomo, 2019, Kota	Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah Variabel Tingkat kemandirian	Tempat penelitian : Kota di Jawa Barat	Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah	Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur &

	di Jawa Barat Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	keuangan daerah		berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, keudanya berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Teknik Sipil) Vol. % Oktober 2019
19	Ulfirah Mutmainah Ashary, Firman Menne, Thamrin Abduh, 2023, Kabupaten Kepulauan Selayar judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Melalui UMKM	Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah Variabel kemandirian keuangan daerah	Tempat penelitian : Kabupaten Kepulauan Selayar Metode analisis : analisis jalur	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Indonesiaan Journal of Business and Management Vol. 6 nomor 1 Desember 2023 E-ISSN : 24603767
20	Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi	Variabel pendapatan asli daerah	Variabel belanja modal	Pendapatan asli daerah berpengaruh	Jurnal EK&BI, Volume 3 Nomor 2

Septania Parapat	Variabel	terhadap	ISSN :
Pengaruh	Tingkat	kemandiri	2620-
Pendapatan	kemandirian	an	7443
Asli Daerah	keuangan	keuangan	
dan Belanja	daerah	daerah	
Modal			
terhadap			
Kemandiria			
n Keuangan			
Daerah			

Rahma Fadhilah Nurul Hikmat (213403058) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016 – 2023)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, terdapat teori dan kebijakan yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori keagenan (*Agency Theory*) dan kebijakan otonomi daerah. Teori agensi (*agency theory*) yang disampaikan Jensen & Meckling (1976:380) menyatakan bahwa teori agensi adalah hubungan keagenan yang mengikat sebagai bentuk kerjasama antara *principal* dan melibatkan *agent* dalam menjalankan aktivitas. Teori Keagenan (*Agency Theory*) secara umum diartikan sebagai suatu hubungan antara dua pihak ataupun lebih yang berperan menjadi pemberi wewenang (*Principal*) dan penerima wewenang (*agent*) yang terkait di dalam suatu kontrak. Menurut Halim & Kusufi (2012:128) yang menyatakan "Teori Agensi adalah teori hubungan utama dengan agen". Kasus lain dengan Supriyono (2018:63) yang menyatakan "Teori Keagenan menyatakan bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya hubungan kontraktual antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah.

Di dalam struktur pemerintahan hubungan keagenan menjadi suatu konsep yang penting, karena aktivitas organisasi pemerintahan yang selalu berhubungan dengan pendelegasian wewenang. Dimulai dari pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999.

Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dalam konteks teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang ditugaskan oleh pemerintah daerah (principal) untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah daerah berhasil dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang juga meningkat, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai.

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2023) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Rindiana (2022) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah, Khairunnisa (2019) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah, Warman & Arza (2024) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ashary et al. (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Tolosang (2018) menunjukkan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan Novitasari & Novitasari (2019) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada dan harapan peneliti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Keterkaitan pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi terlihat ketika peningkatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah daerah. Dalam kerangka teori agensi, pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar PAD, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai program – program Pembangunan.

Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah (PAD) berfungsi sebagai variabel independen dan sebagai indikator dalam pengukuran kemandirian keuangan daerah. Sebagai variabel independen, pertumbuhan pendapatan asli daerah diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian keuangan, dimana peningkatan pendapatan asli daerah memungkinkan daerah untuk lebih mandiri.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita Laoli et al. (2020) yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, Kristina et al. (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Andriani & Wahid (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Ardiansyah (2023) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumila (2023) menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli

daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan teori dan harapan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini mengangkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah sebagai dua elemen penting yang saling terkait dalam kerangka kerja keuangan daerah. Meskipun interaksi antara kedua variabel ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks, penulis berupaya untuk menyoroti pengaruh masing – masing variabel independen secara eksklusif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tanpa adanya pengaruh dari variabel lain.

Dengan mengedepankan satu sisi dari hubungan ini, diharapkan analisis yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kemandirian keuangan dan bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah juga berpengaruh dalam peningkatan kemandirian keuangan, serta implikasinya bagi kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Dimana dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah tanpa pengaruh dari variabel lain. Di sisi lain, untuk mengkaji pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), dilakukan analisis yang menitikberatkan pada sumber – sumber pendapatan asli daerah untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

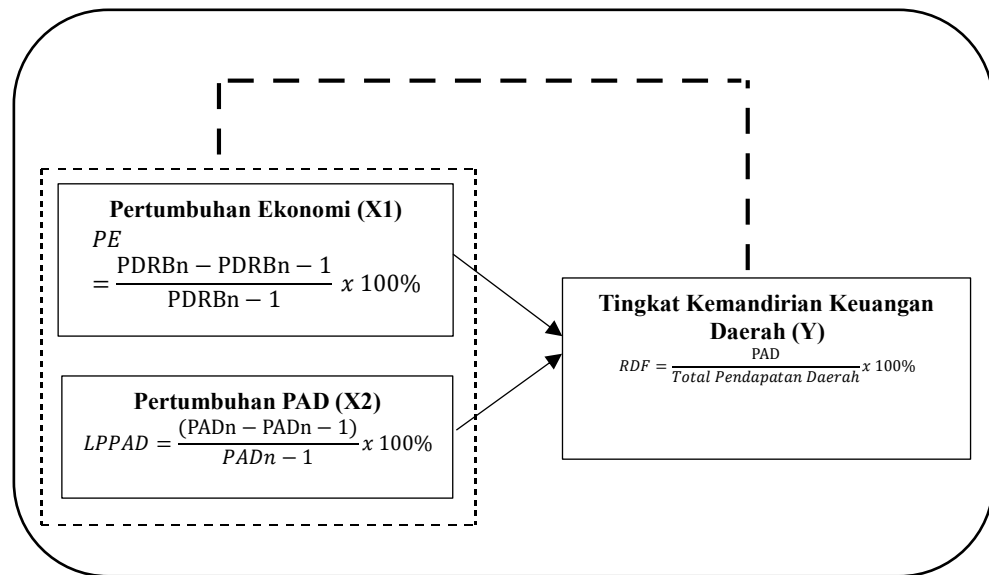
Kemandirian daerah menjadi salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari sumber pendapatan daerah. Dalam teori agensi, jika pemerintah daerah dapat memaksimalkan PAD, maka kemandirian keuangan juga akan meningkat. Hal ini memberi pemerintah daerah lebih banyak kebebasan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun rasio yang digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal daerah. Rasio ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan komponen yang akan dihitung adalah dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Dimana rasio tersebut akan menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai daerahnya sendiri menggunakan pendapatan dari sumber internal. Indikator ini adalah ukuran yang lebih komprehensif dari kemandirian keuangan karena mencakup semua pendapatan yang diterima daerah, termasuk PAD dan sumber pendapatan lainnya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan kemandirian keuangan daerah saling berinteraksi dalam kerangka teori agensi dan dalam perwujudan otonomi daerah. Peningkatan ekonomi berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah menjadi lebih mandiri secara finansial yang memperkuat

kapasitasnya untuk melakukan pembangunan. Kemandirian keuangan yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk proyek – proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak dari judul penelitian yaitu “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Maka berikut Gambaran paradigma penelitian berikut indikator – indikator setiap variabel penelitian. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan	:
_____	: Secara parsial
-----	: Secara simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2018:99). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antar variabel – variabel yang diteliti. dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari gambaran kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016-2023;
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2016-2023.